

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASESMEN STANDARDISASI PENDIDIKAN DAERAH PADA SEKOLAH DASAR FAVORIT DI KOTA YOGYAKARTA

POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL EDUCATION STANDARDIZATION ASSESSMENT IN FAVORITE ELEMENTARY SCHOOL AT YOGYAKARTA CITY

Oleh: Sri Rumpun Angguning Puan Ramadini, Universitas Negeri Yogyakarta
srirumpun.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) pada sekolah dasar Favorit di Kota Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ASPD di Kota Yogyakarta pada sekolah dasar favorit telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik antara seluruh pihak sehingga kendala dapat segera teratasi. Faktor pendukung implementasi ASPD yakni pemahaman yang baik dalam menjalankan ASPD baik di tahun 2021 hingga 2022. Faktor penghambat yang ditemukan yakni terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk ASPD 2022 berbasis komputer seperti jumlah komputer yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah peserta ASPD di setiap sekolah, siswa belum lancar dalam mengoperasikan komputer, serta butir soal yang diberikan dianggap kurang sesuai dengan kurikulum yang berjalan karena merupakan irisan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013.

Kata Kunci: Kebijakan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD), Sekolah Dasar Favorit, Implementasi Kebijakan

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Regional Education Standardization Assessment (ASPD) policy in favorite primary schools in Yogyakarta City and its supporting and inhibiting factors. Descriptive qualitative method was used in this research. Data were collected through interviews, observations and documentation. The results showed that the implementation of the ASPD policy in Yogyakarta City in favorite primary schools has been running in accordance with the applicable SOP. This can be proven by the good cooperation between all parties so that obstacles can be resolved immediately. Supporting factors for the implementation of ASPD are a good understanding of running ASPD both in 2021 and 2022. The inhibiting factor is that there are inadequate facilities and infrastructure for computer-based ASPD 2022, such as the number of computers available is not balanced with the number of ASPD participants in each school, students are not yet fluent in operating computers, and the items given are considered inappropriate for the current curriculum because they are a piece of the 2006 curriculum and the 2013 curriculum.

Keywords: Regional Education Standardization Assessment Policy (ASPD), Favorite Elementary Schools, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Semua insan berhak mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan sangat penting karena berkontribusi besar dalam mencapai

kemajuan di berbagai kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bab 2 pasal 3 menegaskan tentang fungsi dan peran tersebut-

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mejadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pelaksanaan pendidikan pada tahun 2020 hingga kini mendapatkan sebuah hambatan dan tantangan baru yaitu dengan adanya pandemi Covid-19. Virus Corona mempunyai sifat yang sangat mudah menular. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan pendidikan baru yang efektif dalam masa pandemi Covid-19. Alternatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara resmi ditetapkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Perubahan kebijakan pendidikan secara cepat khususnya berupa pembelajaran secara *online* berdampak dalam perubahan pelaksanaan pendidikan.

Keterbatasan akses terhadap fasilitas belajar menjadi masalah baru mengingat masih banyaknya masyarakat yang berada pada ekonomi menengah ke bawah sulit mempunyai akses belajar secara daring yang memadai. Kemudian juga terjadi pergeseran tujuan pendidikan menyesuaikan situasi dan kondisi pada setiap daerah karena setiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda-beda dalam upaya pemberantasan penyebaran Covid-19.

Hal yang paling terlihat ialah saat dihapuskannya Ujian Nasional (UN) yang selama beberapa tahun ini menjadi tolok ukur kemampuan peserta didik di skala daerah maupun nasional. Pada tahun 2021, UN resmi dihapus dan sudah tercantum pada Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Surat edaran tersebut diterbitkan Mendikbud di Jakarta pada 1 Februari 2021. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. (kabar24.bisnis.com)

Ditiadakannya UN pada tahun 2020, serta resmi dihapus pada tahun 2021 menjadikan Pemda DIY berinisiatif membentuk sebuah kebijakan guna dilakukannya pemetaan kualitas hasil pembelajaran pada masa tanggap darurat pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta.

Kebijakan tersebut berupa Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).

Seperti yang telah disebutkan, latar belakang munculnya ASPD merupakan sebuah inisiatif dan alternatif kebijakan dari Pemda DIY untuk memetakan kualitas pendidikan yang bersepakat dengan seluruh Dinas Dikpora Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. ASPD berfungsi untuk mengukur capaian siswa ditingkat akhir yang dapat digunakan sebagai penambahan penilaian bagi siswa untuk ke jenjang pendidikan berikutnya meskipun PPDB tetap menggunakan zonasi, nilai ASPD ini akan berguna seperti nilai capaian prestasi siswa.

Berdasarkan pemaparan pihak Dinas Dikpora DIY, dapat dilihat bahwa ada atau tidaknya UN pelaksanaan ASPD akan tetap ada. Jadi data primer dari ASPD akan digunakan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik itu sendiri untuk menilai sejauh mana pemahaman materi selama ini sehingga dapat mengevaluasi diri serta meningkatkan kemampuannya pasca ASPD berlangsung. Sedangkan ASPD akan menjadi data sekunder untuk memetakan mutu capaian tingkat akhir di masing-masing satuan pendidikan guna menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan pengajaran dan pemahaman materi kepada siswa yang dilakukan di sekolah. Sangat ditekankan bahwa nilai ASPD tidak boleh digunakan untuk menentukan kelulusan.

Bahkan nilai-nilai hasil ASPD itu dibagikan dinas setelah kelulusan sekolah. Sehingga tidak akan digunakan oleh sekolah untuk menentukan kelulusan di sekolah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan ASPD di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal yang disepakati oleh pemerintah provinsi. Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan ASPD khususnya pada SD Favorit di kota Yogyakarta sehingga dapat menjadi pembelajaran dan salah satu bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang implementasi ASPD di Kota Yogyakarta. Informan yang dipilih yaitu Dinas Dikpora DIY selaku pembuat kebijakan ASPD, promotor dalam pelaksanaan kebijakan yaitu Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, pemantau teknis di lapangan pada hari pelaksanaan PTM hingga ASPD yaitu LO DIY, serta dua sekolah yang terdiri dari satu sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta yakni SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih antara lain terdiri dari satu sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta yakni: SDN Lempuyangwangi, dan SD Muhammadiyah Sokonandi 1. Peneliti memilih kedua sekolah berikut berdasarkan pemilihan lokasi yang strategis dan sesuai dengan sasaran dalam penelitian ini yakni sekolah dasar favorit di kota Yogyakarta.

Sekolah favorit pada dasarnya sering dikaitkan dengan labeling dari masyarakat sekitar baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, tingkat kelulusan yang baik, kompetensi yang baik, tingkat peminatan masyarakat terhadap suatu sekolah, terutama pada akreditasi yang dimiliki oleh suatu sekolah tersebut. Karena bagaimanapun akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan oleh badan yang berwenang. Pengakuan ini diberikan setelah lembaga pendidikan tersebut dinilai memenuhi syarat dan kriteria tertentu.

1. SDN Lempuyangwangi

Adapun lokasi penelitian utama yang dipilih sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan kebijakan ASPD yakni: SDN Lempuyangwangi sebagai contoh SDN favorit di kota Yogyakarta. Peneliti memilih SDN Lempuyangwangi atas rekomendasi dari LO DIY dan lokasi yang dekat dengan Dinas Dikpora Kota Yogyakarta sehingga lebih efektif dan efisien. Sesuai data

Dapodik, SDN Lempuyangwangi sudah berakreditasi A sejak tahun 2014 dan melakukan akreditasi kembali di tahun 2019.

2. SD Muhammadiyah Sokonandi

Selain SDN Lempuyangwangi, peneliti juga mengambil salah satu SD swasta favorit di kota Yogyakarta yakni SD Muhammadiyah Sokonandi. Pemilihan SD Muhammadiyah Sokonandi karena peneliti turut serta dalam pemantauan ASPD 2021 bersama LO DIY serta lokasi yang dekat dengan Dinas Dikpora DIY sehingga lebih efektif dan efisien. SD Muhammadiyah Sokonandi telah mendapatkan akreditasi sekolah A berdasarkan sertifikat 10.01/BAP-SM/TU/XI/2017.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengambil data penguat yang berasal dari lembaga pembentuk dan pelaksana ASPD, diantaranya adalah: Dinas Dikpora DIY, Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, dan LO DIY selaku pengawas pelaksanaan ASPD. Waktu penelitian ini di mulai sejak bulan Mei 2021 sampai bulan April 2022.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* sampling. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam pengambilan sumber data dengan pertimbangan dapat memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan. (Sugiyono, 2012). Teknik *purposive* sampling adalah subjek yang

sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:37).

Adapun pemilihan narasumber dalam penelitian ini ialah mereka yang terlibat secara langsung dalam Pelaksanaan Kebijakan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta diantaranya adalah:

1. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar Dinas Dikpora Kota Yogyakarta.
3. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Dikpora Kota Yogyakarta.
4. Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah di LO DIY.
5. Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan di LO DIY.
6. Kepala Sekolah SDN Lempuyangwangi dan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi.
7. Guru Kelas 6 SDN Lempuyangwangi dan Guru Kelas 6 SD Muhammadiyah Sokonandi.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan yang dapat menjelaskan tentang asal mula adanya kebijakan ASPD. Maka dari itu, peneliti menambahkan beberapa informan yang relevan dari beberapa pihak seperti Dinas

Dikpora DIY yang memiliki peran utama dalam proses terbentuknya kebijakan ASPD yang berlaku di DIY. Sedangkan Dinas Dikpora Kota Yogyakarta merupakan promotor dalam pelaksanaan ASPD dan LO DIY sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan ASPD.

Dalam tingkat meso terdapat satu narasumber penelitian yaitu dari pihak Dinas Dikpora DIY selaku pembuat kebijakan ASPD di DIY yakni bapak NW, serta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ASPD pada tiap-tiap kabupaten/kota, dalam penelitian ini yakni pihak Dinas Dikpora Kota Yogyakarta yaitu ibu DN dan bapak ST, serta pihak yang mengawasi pelaksanaan ASPD dari LO DIY yakni Bapak TN dan Ibu ID.

Narasumber penelitian pada tingkat mikro peneliti memilih 2 sekolah dasar favorit di kota Yogyakarta yaitu SDN Lempuyangwangi yakni Ibu EK dan Bapak GT, serta SD Muhammadiyah Sokonandi yakni Ibu AR dan Ibu SN. Harapannya pemilihan subjek yang berdasarkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ASPD mampu memberikan data yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Prosedur

Penelitian ini bermula karena dihapusnya ujian nasional yang telah menjadi alat ukur evaluasi pembelajaran

tingkat nasional. Lalu muncul ASPD yang menjadi inisiatif pemerintah DIY untuk digunakan sebagai alat ukur evaluasi pembelajaran dimasa pandemi maupun pasca pandemi covid-19. Akan tetapi, hasil ASPD ini tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Namun hanya menjadi nilai tambah bagi siswa yang akan melanjutkan sekolah negeri jenjang berikutnya.

Pada pelaksanaan ASPD pertama, peneliti berkesempatan memantau langsung berjalannya ASPD di SD Muhammadiyah Sokonandi DIY bersama LO DIY selama 3 hari berturut-turut. Peneliti mulai tertarik meneliti ASPD ketika muncul pro dan kontra pada awal munculnya kebijakan ASPD dikalangan masyarakat terutama pada orang tua siswa yang tidak menghendaki anaknya memasuki sekolah negeri pada jenjang berikutnya.

Peneliti menyusun rencana penelitian dibantu oleh pihak LO DIY agar penelitian dapat terlaksana dengan baik. Ketika sampai pada proses pengumpulan data, peneliti mengurus surat izin observasi hingga surat izin penelitian melalui sistem dan prosedur penelitian UNY. Lalu peneliti mengirimkan surat-surat tersebut kepada masing-masing instansi terkait.

Setelah mendapat izin untuk melakukan wawancara dan memantau ASPD yang berjalan ditahun 2022, peneliti membuat jadwal wawancara serta menyusun draft wawancara yang telah

direvisi oleh dosen pembimbing. Penelitian berjalan cukup baik dan berhasil mendapatkan semua jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian dari narasumber. Tahap akhir yaitu menyusun hasil penelitian yang diawali dengan mentranskrip hasil wawancara dengan seluruh narasumber, menyusun jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, hingga menyusun kesimpulan dan saran dari hasil wawancara.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian dibantu dengan alat bantu yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Data, Instrumen, dan Teknik

Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau langsung seperti pengamatan langsung ketika ASPD sedang berjalan dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ASPD sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi seperti wawancara dengan para pengawas dan guru terkait pra ASPD hingga pasca ASPD berlangsung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data pendukung adalah observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Teknik analisis interaktif ini terdiri dari tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2007: 91) dalam Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 pada sektor pendidikan, Dinas Dikpora DIY pada tanggal 20 Maret 2020 menerbitkan Surat Keputusan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini merupakan respon cepat pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Pelaksanaan pembelajaran daring dimulai di Yogyakarta sejak 23 Maret 2020.

Salah satu bentuk upaya dari pemerintah provinsi DIY ialah membentuk kebijakan ASPD guna melakukan pemetaan sebagai evaluasi pembelajaran selama masa pandemi covid-19. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru dan masih bisa terus berubah baik dari segi peraturan, maupun pelaksanaannya. Hasil dari ASPD dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi setiap lembaga pendidikan khususnya guru selaku tokoh utama yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan ASPD sudah direncanakan sejak tahun 2020 ketika muncul wacana bahwa UN akan dihapuskan. Tetapi, adanya ASPD bukan sebab dari UN dihapus. Karena pada dasarnya, ASPD setara dengan USBN, bukan dengan UN. Berdasarkan pemaparan pihak Dinas Dikpora DIY, jika pandemi berakhir pun ASPD akan terus ada. ASPD terbentuk bukan karena adanya pandemi, tetapi karena provinsi DIY membutuhkan instrument ukur untuk melihat peta mutu pendidikan ditingkat akhir dan nanti akan dilihat sejauh mana siswa itu memahami materi.

Jika provinsi lain alat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya menggunakan rapor, DIY sepakat untuk menggunakan nilai ASPD sebagai tambahan. ASPD itu ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika dan IPA.

ASPD 2021 sifatnya tidak wajib. Karena ASPD digunakan untuk PPDB, jadi yang tidak akan meneruskan ke sekolah negeri dan memilih untuk melanjutkan ke sekolah swasta tidak mengikuti ASPD tidak masalah karena swasta tidak menggunakan PPDB, PPDB hanya bagi siswa yang ingin ke sekolah negeri. Namun sejak ASPD 2022, ASPD menjadi wajib setelah dilakukan evaluasi karena dirasa tetap sulit dalam pemetaan pendidikan di DIY jika peserta ASPD tidak secara menyeluruh.

Asesmen Standardisasi Pendidikan

Daerah

ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan (jenjang SD/MI/Paket A/Ulya dan SMP/MTs dan Paket B/Wustha) pada mata pelajaran tertentu di DIY dengan mengacu pada standard kompetensi lulusan. ASPD merupakan hasil kesepakatan bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kawil Kemenag D.I Yogyakarta bahwa diperlukannya alat untuk mengukur dan menilai pencapaian standard kompetensi lulusan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

ASPD dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu

dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah melalui proses persiapan selama tahun 2020, maka ASPD dilaksanakan pada bulan April–Mei 2021 pada jenjang SD, SMP dan SMA.

ASPD ini ditujukan bagi siswa lulusan luar DIY dan siswa lulusan DIY tahun 2020 yang ingin mengikuti PPDB SMA dan SMK Negeri di DIY Tahun 2021. Mata pelajaran yang masuk dalam ASPD ini adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Melihat bahwa setelah UN dihapus tidak ada program yang memadai untuk melakukan pemetaan ASPD 2021 telah berjalan, maka muncul rancangan bahwa akan dilaksanakannya AN. Namun perlu digaris bawahi bahwa hasil ASPD ataupun AN ini tidak berpengaruh pada kelulusan siswa. Akan tetapi akan berguna bagi mereka yang akan memilih sekolah dijenjang berikutnya.

Implementasi Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah

Implementasi ASPD di DIY berjalan cukup baik mengingat pelaksanaannya dilaksanakan ditengah situasi darurat karena penyebaran covid-19 sehingga pelaksanaannya sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak guna mengantisipasi penyebaran di sekolah. ASPD tahun 2021 dilaksanakan berbasis kertas pada seluruh sekolah di DIY dengan rincian 5 kabupaten/kota. Berdasarkan

pemaparan pihak Dinas Dikpora (Dinas Dikpora) DIY, ditemukan bahwa ASPD ini hanya dilaksanakan di 2 tempat saja dari seluruh daerah di Indonesia, yakni Surabaya, dan DIY. Namun ASPD di Surabaya hanya dilaksanakan pada tingkat SMA, sedangkan DIY melaksanakan ASPD dari mulai tingkat SD hingga SMA.

Berdasarkan laporan yang masuk dalam konsultasi aduan LO DIY, pelaksanaan ASPD memunculkan banyak pro dan kontra terutama dari pihak orang tua siswa karena dilaksanakan pada masa pandemi. Sedangkan jumlah korban Covid-19 sedang sangat tinggi pada tahun 2021. Ada juga beberapa orang tua siswa yang kurang memahami apa tujuan dari pelaksanaan ASPD sehingga tidak antusias karena merasa kurangnya urgensi dari ASPD tersebut. Meski demikian, ASPD pada tahun 2021 tetap dilaksanakan serentak se-DIY baik tingkat SD, SMP hingga SMA melalui pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat dengan presentase kehadiran siswa sebanyak 80% (Dinas Dikpora Kota Yogyakarta).

Namun, berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan oleh peneliti bersama LO DIY pada ASPD yang berjalan di tahun 2021, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi catatan untuk ASPD di tahun-tahun berikutnya. Kendala yang muncul yakni kendala jaringan di beberapa sekolah

mengingat adanya pilihan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian di sekolah maka dikehendaki mengikuti ujian dari rumah dan kendala muncul di beberapa jaringan sekolah karena ternyata kekuatan jaringan yang ada di sekolah lebih lemah dari yang melaksanakan ujian di rumah. Kendala lainnya ialah penerapan protokol kesehatan yang masih perlu dilakukan pemantauan agar pelaksanaan ASPD diseluruh sekolah berjalan tertib sehingga dapat menjadi kepercayaan bagi orang tua siswa untuk mengizinkan anaknya mengikuti ASPD.

Kemudian berdasarkan data di lapangan pada ASPD di tahun kedua, yakni tahun 2022 yaitu berbasis komputer. Sehingga pelaksanaannya cukup jauh berbeda jika dibandingkan dengan berbasis kertas di tahun pertama. Alasan mengapa ASPD 2022 berbasis komputer ialah karena adanya Asesmen Nasional (AN) yang berbasis komputer yang sudah dimulai di tahun 2021 dengan melakukan sampel di beberapa sekolah bagi kelas 5 di tingkat sekolah dasar, dan kelas 8 bagi tingkat sekolah menengah pertama. Jadi ASPD pun dibuat dengan basis komputer agar anak-anak terbiasa dengan komputer. Ada 3 kabupaten/kota yang menggunakan komputer yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Sleman. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo masih berbasis kertas. Pertimbangannya adalah setiap sekolah di

Kota Yogyakarta sudah mempunyai laboratorium komputer untuk menyelenggarakan ASPD berbasis komputer.

ASPD berbasis komputer dinilai lebih efisien karena hasilnya dapat diketahui lebih cepat serta meminimalisir biaya cetak. Sayangnya kendala datang dari siswa yang kurang lancar mengoperasikan komputer. Hal tersebut memunculkan suatu tantangan baru bagi pihak sekolah terutama bagi guru yang mengajar para siswa secara langsung. Di tengah tantangan adaptasi guru dan peserta didik dalam menyesuaikan kondisi pasca pandemi, kini guru pun harus siap menyiapkan peserta didik untuk lebih mengenal komputer. Problematika ini tentu dirasakan oleh guru sekolah dasar. Karena jika dilihat dari hasil tes pendalaman materi pra ASPD, ditemukan beberapa siswa yang belum begitu mengenal perangkat komputer dan bagaimana cara menggunakan komputer tersebut untuk melakukan ujian.

Implementasi kebijakan ASPD sebagai evaluasi pembelajaran pada Sekolah Dasar Favorit di Kota Yogyakarta

Dalam menganalisis data yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggunakan teori Edward III. Edward III memiliki teori yang mampu menganalisis sebuah keefektifan implementasi kebijakan

dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dapat dilihat bahwa dalam implementasi ASPD, koordinasi antara dinas dan sekolah-sekolah sudah cukup baik sehingga kendala yang muncul cenderung sedikit. Seluruh pihak yang terlibat sangat cepat tanggap dalam menangani permasalahan yang ada. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dan tidak difahami, akan cepat teratasi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik.

1. Komunikasi

a. Komunikasi dengan pelaksana kebijakan

Komunikasi yang dilakukan oleh SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi kepada Dinas Dikpora DIY dan Kota telah berjalan baik, hal ini terlihat dengan adanya komunikasi intens berupa forum rapat yang dilaksanakan sejak awal tahun baik dengan *online* maupun *offline*.

b. Komunikasi dengan orang tua siswa

Komunikasi yang dilakukan oleh SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi kepada orang tua siswa berjalan baik karena adanya dukungan yang baik pula dari komite sekolah. Setiap sekolah memiliki caranya sendiri untuk menjaga komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan dalam mensosialisasikan adanya ASPD ini

c. Komunikasi dengan siswa

Komunikasi yang dilakukan oleh SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi kepada siswa berjalan baik karena adanya TPM yang diadakan rutin sehingga sekolah dapat mengevaluasi siswa secara bertahap. Hal ini juga merupakan kunci bagi sekolah khususnya guru kelas 6 dalam memperbaiki kualitas pembelajaran guna meningkatkan kepercayaan diri siswa dan hasil pembelajaran yang semakin meningkat.

2. Sumber Daya

Sumber daya sudah memadai mulai dari sumber daya manusia hingga penggunaan alokasi waktu selama ASPD berlangsung.

1. Sumber Daya Manusia

Baik SDN Lempuyangwangi maupun SD Muhammadiyah Sokonandi, sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan ASPD adalah seluruh warga sekolah khususnya penetapan tim panitia pelaksanaan ASPD di sekolah. Setiap sekolah membentuk panitia-panitia kecil agar pelaksanaan ASPD dapat berjalan maksimal. Hal tersebut telah tertuang dalam POS ASPD dengan jelas dan rinci mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab setiap panitia.

2. Sumber Pendanaan

Sesuai pemaparan seluruh informan, sumber pendanaan ASPD berasal dari dana BOSDA. Lebih rinci lagi yakni untuk pegawai ASPD menggunakan dana BOS,

kalau ASPD sendiri menggunakan anggaran daerah (APBD). Sehingga setiap sekolah hanya menjalankan saja, tidak mengadakan pungutan apapun.

3. Sarana dan Prasarana

Mengingat subjek penelitian adalah sekolah favorit, sesuai hasil penelitian di lapangan bahwa sarana dan prasarana dari SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi telah baik dalam menerapkan protokol kesehatan hingga kapasitas ruang ujian. Namun sarana dan prasarana bagi ASPD berbasis komputer ditemukan beberapa kekurangan salah satunya jumlah komputer. Oleh karena jumlah komputer yang kurang karena tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ujian, pada akhirnya sekolah memerlukan bantuan komite sekolah dan orang tua siswa.

4. Alokasi Waktu

Sesuai dengan hasil wawancara dan berdasarkan pada POS ASPD, alokasi yang digunakan oleh peserta ASPD adalah 90 menit per sesi/per mata pelajaran. Mata pelajaran yang diujikan ada 4 mata pelajaran bagi siswa SD dan SMP, dan seluruh mata pelajaran bagi siswa SMA. Namun ada kekhususan bagi siswa ABK yang mengikuti ujian ASPD, yakni penambahan waktu selama 30 menit per mata pelajaran. Sehingga siswa ABK mendapatkan waktu selama 120 menit untuk mengerjakan soal per sesi/ per mata pelajarannya.

3. Sikap/Disposisi

Dalam hal ini berkaitan dengan komitmen dari setiap pihak dalam menjalankan kebijakan ASPD. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, sikap/disposisi dari seluruh pihak sudah cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa hal yang dirasa kurang dalam kebijakan ASPD ini terutama dari sisi guru kelas 6 yang berhadapan langsung dengan proses belajar mengajar dengan para peserta ASPD. Namun setiap pihak tetap berusaha semaksimal mungkin agar ASPD ini berjalan sesuai harapan dan sesuai tujuan bersama.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diterjemahkan ke dalam bentuk pembuatan SK Kepala Dinas Dikpora DIY Tentang Pemetaan Kualitas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tentang Pembentukan Tim Panitia ASPD di masing-masing sekolah dalam POS ASPD. Kepala sekolah tetap menjadi penanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ASPD di sekolah, dibantu oleh guru dan karyawan yang tergabung dalam tim panitia ASPD sekolah sebagai pelaksana inti ditambah proktor pada ASPD 2022. Dalam SK Kepala Dinas Dikpora DIY yang termuat pada POS ASPD tersebut sudah memuat deskripsi tugas yang memudahkan pelaksana kebijakan dalam melakukan tugas dan perannya masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan ASPD pada Sekolah Dasar Favorit

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor pendukung di SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta dalam implementasi ASPD adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa dan sekolah dengan Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, Dinas Dikpora DIY, hingga LO DIY.
- b. Adanya media sosial dan berbagai platform pendukung sehingga dapat berkomunikasi intens dengan seluruh pihak.
- c. Adanya POS ASPD dan Juknis ASPD yang disusun oleh Dinas Dikpora DIY memudahkan sosialisasi bagi para pelaksana ASPD.
- d. Adanya dukungan dana khusus ASPD di dalam BOSDA.
- e. Adanya komitmen yang baik dari kepala sekolah dan Dinas Dikpora DIY selaku pembentuk kebijakan.
- f. Kekompakan yang tercipta turut serta menyukseskan ASPD dari sosialisasi kepada orang tua siswa, pembentukan panitia kecil, mempersiapkan pelaksanaan ASPD, Pelaksanaan, hingga mengevaluasi ASPD.
- g. Sarana dan prasarana yang ada di SDN Lempuyangwangi dan SD

Muhammadiyah Sokonandi telah memadai bagi ASPD 2021 berupa ruang ujian dan berbagai protokol kesehatan ketika pelaksanaan ASPD.

- h. Persiapan oleh guru kelas 6 bagi siswa dalam menyiapkan materi ujian sehingga terlihat dari hasil ASPD yang cukup memuaskan.

2. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berikut adalah faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ASPD di SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi sebagai berikut:

- a. Pada pelaksanaan ASPD 2021 sebenarnya tidak ada faktor penghambat yang sangat fatal, hanya saja lebih menekankan pada protokol kesehatan yang ketat mengingat saat itu covid-19 sedang meningkat sangat tinggi;
- b. Adanya beberapa misscom karena ASPD merupakan kebijakan baru;
- c. Peneliti juga menemukan adanya hambatan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal karena dirasa masih terlalu sulit meskipun sudah diturunkan levelnya.
- d. Peneliti juga menemukan adanya hambatan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal karena soal yang diberikan berbeda dengan kurikulum yang ada saat ini, yang mana kurikulum yang digunakan masih berupa irisan dari kurikulum 2006 dan 2013 seperti USBN

sebelum adanya ASPD. Sedangkan kurikulum yang siswa gunakan mengacu pada kurikulum 2013 saja.

- e. Mengingat adanya pandemi covid-19, maka kualitas pembelajaran pun menurun, hal ini juga menjadi faktor penghambat bagi beberapa guru untuk mencari inovasi dalam pembelajaran khususnya pada persiapan ASPD.
- f. Peneliti menemukan penemuan baru pada pelaksanaan ASPD 2022 cukup banyak penghambat yang muncul karena perubahan bentuk ujian sehingga setiap sekolah perlu adaptasi kembali mengingat tahun 2022 ini pertama kalinya ASPD dilaksanakan dengan menggunakan komputer.

Karena berbasis komputer tersebut, penghambat yang muncul di SDN Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Sokonandi berupa bentuk adaptasi dari setiap siswa perlu dilatih kembali, sarana prasarana, hingga jaringan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. ASPD merupakan alternatif kebijakan dari pemerintah provinsi DIY untuk mengukur hasil pembelajaran siswa baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi covid-19.
2. Pelaksanaan ASPD tersebut telah berjalan baik karena kedua sekolah yang diteliti merupakan salah satu sekolah

favorit di kota Yogyakarta. Pelaksanaan yang baik tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti adanya komunikasi yang baik, fasilitas sekolah yang telah memenuhi syarat protokol kesehatan, dan faktor pendukung lainnya.

3. Namun sebagai evaluasi, tentu setiap sekolah memiliki kekurangan sehingga menjadi faktor penghambat seperti diantaranya: sempat terjadi miskomunikasi, kurangnya penguasaan materi pada siswa yang berkaitan dengan tingkat kesulitan soal ASPD, hingga perangkat yang kurang memadai untuk ASPD berbasis komputer.

Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, setiap narasumber memberikan harapannya untuk ASPD yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, terkait penelitian tentang Implementasi Kebijakan ASPD ini, maka saran yang dapat peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Perlu apresiasi terhadap inovasi dan upaya adaptasi dari dinas pendidikan untuk tahun ini karena pelaksanaan ASPD berbasis komputer, tetapi akan lebih baik jika dilihat evaluasinya agar pengembangan ASPD akan lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
2. Karena tahun 2022 ini ASPD berbasis komputer yang pertama, diharapkan untuk setiap sekolah itu lebih

mempersiapkan kembali karena itu akan mempengaruhi psikologis siswa dan akan mempengaruhi hasil ASPD.

3. Diperlukan trial ASPD yang lebih sering supaya siswa dapat beradaptasi dalam penggunaan komputer.
4. Masih ada sekolah yang menyelenggarakan ASPD yang menggunakan 3 sesi. Maka diharapkan setiap sekolah memaksimalkan pelaksanaan ASPD hanya 2 sesi.
5. Perlu ditingkatkan validasi soal ASPD karena masih ditemukan kesalahan teks.
6. Konsistensi dalam kebijakan berupa media dalam ujian ASPD. Jika sudah berbasis komputer, maka di tahun berikutnya sebaiknya tidak berubah lagi karena AN sudah berbasis komputer. Seiringan dengan itu, sekolah akan melatih siswa menggunakan komputer sejak kelas 4. Lalu kelas 5 melaksanakan AN, sehingga dengan begitu harapannya di kelas 6 anak-anak itu sudah terbiasa mengerjakan soal dengan berbasis komputer. Sehingga itu akan membuat semangat dari pihak sekolah akan meningkat dan dapat mempersiapkan anak untuk menguasai IT.
7. Penyeragaman regulasi ASPD jika sudah berbasis komputer, supaya tidak berubah menjadi kertas kembali agar tidak membingungkan sekolah dan para siswa. Fokus saja pada 1 regulasi. Karena pada ASPD 2022 masih ada 2 kabupaten yang

- menggunakan kertas yaitu di Kulon Progo dan Bantul.
8. Soal ASPD diharapkan sesuai kurikulum yang berlaku sehingga tidak ada soal irisan dari kurikulum 2006 dan 2013 seperti ASPD tahun lalu dan tahun 2022 ini karena pemahaman dan pendalaman materi yang diterima anak akan berbeda dengan yang diujikan.
 9. Disarankan indikator penilaian disosialisaikan kepada guru dan sekolah jauh sebelum ASPD dilaksanakan sehingga sekolah terutama guru bisa menyiapkan siswa-siswanya lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Permatasari, I. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. TheJournalish: Social and Government, 1(1), 33-37.
- Anggy Giri Prawiyogi, Andri Purwanugraha, Ghulam Fakhry, & Marwan Firmansyah. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa Di Sdit Cendekia Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1), 94-101.
- Awandha, Nio Nehru. *Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak Dan Problem-Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar*. Universitas Islam Balitar Blitar.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, di akses 03 Mei 2022, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2018/01/29/83/jumlah-sekolah-menurut-tingkatan-sekolah-dan-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html>.
- Data Pokok Pendidikan, diakses pada tanggal 03 Mei 2022, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/CA092C50DE6849F0E8C9>
- Fadhilah, V., Setiawan, F., Indriani, T., & Yulianti, S. (2022). *Analisis Kebijakan Asasemen Nasional Pengganti Ujian Nasional terhadap Evaluasi Pendidikan di Indonesia*. *ALSYS*, 2(4), 514-523
- Fajri, H, Ismail. (2015). *Pro Kontra Ujian Nasional*. AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 7, Nomor 2, September 2015, 301-324.
- Hadi, L. (2020). *Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 812-818.
- Hadi, Sumasno. *Ujian Nasional Dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan Pragmatisme*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.
- Hayati, R. (13 Agustus 2022). *Pengertian Teknik Sampling, Jenis, dan Contohnya*. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://penelitianilmiah.com/teknik-sampling/>
- Hidayah, L. (2021). *Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya: Indonesia*. Al-Mafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 3(2), 11-20.
- Hidayah, Nurul. (2013). *Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. *Jurnal Pencerahan* Volume 7, Nomor 1, (Maret) 2013 Halaman 35-40
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Mukhlisoh, N., & Bakar, M. Y. A. . (2021). *Ujian Nasional: Harapan dan tantangan*. Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 9(2), 59-65.
- Novitawati. (2013). *Kesiapan Sekolah Anak Taman Kanak Kanak Berbasis Model Pembelajaran Sentra*. *Jurnal*

- Pendidikan Usia Dini. Volume 7, Edisi 1 April 2013
- Nur'ainah, N., Muazza, M., & Rahman, K. (2022). *Persepsi Guru tentang Implementasi Asesmen Nasional sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan di MIN Batanghari*. *MANAZHIM*, 4(2), 411-426.
- Nurkholis. (2013). *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013, 24-43
- Safitri. (2019). *Dampak Penghapusan Ujian Nasional Yang Akan Diganti Dengan Sistem Asesmen Kompetensi Dan Survey Karakter*. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 3 No. 2 Desember 2019. Universitas PGRI Yogyakarta
- Simbolon, Kerdid (2020) *Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik*. Universitas Kristen Indonesia
- Syafi'i Imam. (2011). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Implementasi MPMBS*.
- Tim TIK SD Lempuyangwangi, diakses pada tanggal 03 Mei 2022, dari <https://www.sdlempuyangwangi.sch.id/>
- Tim Portal Purwokerto 04. (14 Juni 2021). *Nilai ASPD SD Jogja 2021 Sudah Tersebar, Bisa untuk Daftar PPDB SMP Jogja 2021, Datanya di Sini!*. Diambil pada tanggal 04 Mei 2022 dari <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/regional/pr-1152051499/nilai-aspd-sd-jogja-2021-sudah-tersebar-bisa-untuk-daftar-ppdb-smp-jogja-2021-datanya-di-sini?page=2>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wulandari., Wibawa, S., Fitrotun, A., Arafik, M. (2022). *Digitalisasi Assesmen di Sekolah Dasar di Era 4.0*. Vol. 1 No. 1 (2022): PROSIDING WEBINAR NASIONAL PGSD UST 2022.
- Yuliah, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Zakaria, M. (2018). *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Standard Pendidikan Nasional (Analisis Struktur Fungsi)*. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 22-30.